



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 31 Maret 2020

Halaman: 1

Cukup Batasi, Tak Boleh Tutup Total

LOCKDOWN:
Warga melintas di depan gapura yang ditutup sementara di Dusun Ganjuran, Condongcatur, Depok, Sleman, kemarin (30/3).



HB X soal Banyak Warga Dusun yang Lakukan Lockdown

JOGJA, Radar Jogja - Merebaknya Covid-19 membuat masyarakat waspada agar virus korona itu tidak sampai ke wilayahnya. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir warga-warga di dusun hingga RT melakukan kebijakan sendiri menutup akses jalan dengan menuliskan kata lockdown

ELANG KHARISMA DEWANGA/RADAR JOGJA



TANGGAL KORONA

► Baca Cukup... Hal 11



Jika mereka melakukan lockdown, otomatis mereka tidak akan makan. Harus ada orang yang bisa mengantar makanan itu. Jika lockdown dilakukan perekonomian di wilayah itu akan merosot, sehingga tidak dilakukan."

HAMENGKU BUWONO X - Gubernur DIJ

Instansi

1.
2.
3.

tidak Lanjut

tuk Ditanggapi

tuk Diketahui

GRAFIS: HEPRI KARTUN/RADAR JOGJA

Sambungan dari hal 1

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menganggap kebijakan yang dilakukan warga bukanlah *lockdown*. Ia menganggap hal itu untuk mengontrol pendatang saja agar tidak menularkan virus, terutama dari daerah zona merah. "Yang penting hanya mengu-

rangi aktivitas di luar rumah saja. Bukan berarti tidak boleh keluar wilayahnya," tuturnya kepada wartawan kemarin (30/3).

Menurutnya, praktik di lapangan sulit untuk mengontrol karena di desa terlalu banyak jalan masuk ke kelurahan. Bisa dua sampai tiga jalan, sehingga mereka berinisiatif menutup jalan,

sehingga hanya ada satu jalan untuk masuk kelurahan itu. "Dengan harapan satu jalan itu dapat mempermudah pihak desa untuk mengontrol siapa yang masuk. Bagi saya itu lumrah," tambahnya.

HBX menganggap kebijakan yang mereka buat itu bukanlah *lockdown*. Karena kalau *lock-*

down itu harus semua diisolasi, yakni tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk. "Kalau mereka masih aktivitas seperti biasa. Hanya mengurangi aktivitas kumpul atau ramai-ramai," kata bapak lima puteri yang juga raja Keraton Jogja ini.

Sedang *lockdown*, lanjutnya, harus ada yang memfasilitasi.

UDARA SEGAR:
Suasana kawasan Malioboro yang lengang kemarin, (30/3). Sejumlah kawasan dan ruas jalan di Jogja sepi dari kendaraan yang berdampak berkurangnya polusi udara.



GRIPRAJUS BRAMANTYO FOR RADAR JOGJA

Misalnya jika sakit pihak medis datang ke rumah. "Jika mereka melakukan *lockdown*, otomatis mereka tidak akan makan. Harus ada orang yang bisa mengantarkan makanan itu. Jika *lockdown* dilakukan perekonomian di wilayah itu akan merosot, sehingga tidak dilakukan," jelasnya.

Terkait pendatang dari luar kota, gubernur tidak permasalahan hal itu. Ia masih memperbolehkan para pendatang masuk ke DIJ. Dia masih memberikan toleransi kepada pendatang dengan melihat maksud mereka datang ke Jakarta apa.

"Bisa jadi pemudik datang karena habisi di PIK atau lain sebagainya. Yang penting mereka dapat mengontrol dan mendisiplinkan diri, agar jika memang terjangkit, mereka tidak menularkan virus tersebut ke orang lain," jelasnya.

Distribusi APD dan RDT Dilakukan Satu Pintu

Sebanyak 4.000 alat pelindung diri (APD) dan *rapid diagnostic test* (RDT) yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat, dikabarkan masih tersimpan di gudang Badan Pen-

anggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ sejak tiba Minggu (29/3).

Komandan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD DIJ Wahyu Pristawan mengatakan, terkait ribuan APD berupa baju hazmat yang terbungkus dengan karton itu pihaknya kini menunggu arahan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIJ. "Informasi terakhir kami belum tahu Dinkes seperti apa, mereka sangat tertutup," katanya saat dihubungi *Radar Jogja* kemarin (30/3).

Meski demikian, pihaknya telah siap mendistribusikan kapan pun APD itu untuk para tenaga medis yang menangani pasien Covid-19. "Segerakan saja, karena melihat tenaga medis sudah sangat terbatas," ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Pemprov DIJ untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih mengatakan, distribusi APD sudah dilakukan sebelum Pemprov menerima bantuan dari pemerintah pusat. Disebar sesuai kebutuhan setiap rumah sakit (RS) rujukan.

"Kalau yang ada di gudang BPBD nantinya akan kami pindahkan ke gudang farmasi Dinkes supaya RS dapat melakukan pengambilan seperti mekanisme biasanya," katanya.

Menurutnya, RS rujukan di DIJ tak lagi kekurangan APD. Ribuan APD yang dikabarkan menumpuk di gudang BPBD adalah stok yang belum sempat diangkut ke Instalasi Farmasi. "Sampai seminggu ke depan masih aman. Nanti tambah stok, *Insyallah* bisa untuk melanjutkan," katanya.

Penyaluran APD ke fasilitas kesehatan dilakukan satu pintu yakni melalui Instalasi Farmasi Dinkes. APD beserta *test kit* atau RDT yang berada di gudang BPBD DIJ segera dialihkan ke gudang Instalasi Farmasi itu.

Terkait prosedur pengambilan APD, RS perlu mengajukan permintaan ke Dinkes dan mengambil kebutuhan di Instalasi Farmasi. Sedangkan RDT sudah diberikan alokasi sesuai prioritas untuk tenaga medis di RS yang merawat pasien penderita Covid-19. "RDT untuk keperluan *tracing* kontak di masyarakat. Dinkes Kota/Kabupaten akan mengajukan kebutuhan sesuai hasil penyidikan epidemiologi awal. Jadi hasil *tracing* menjadi pengajuan kebutuhan RDT" paparnya. (crl/wia/tor/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pengelolaan Pasar			
3. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005